
IMPLEMENTASI PARADIPLOMASI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU– REPUBLIK SEYCHELLES DALAM PENGEMBANGAN *ECOTOURISM* DI PULAU MARATUA

Ade Gita Fitri¹

Abstract: *This study aims to analyze and describe the implementation of the paradiplomacy between the local government and the Republic of Seychelles in the development of ecotourism on the island of Maratua. Maratua Island is part of the Berau Regency region in eastern Kalimantan. This island is ideal for swimming, diving, and snorkeling. Maratua Island known as the coral triangle as an underwater life paradise, a beautiful underwater park with a great variety of fish, corals, green turtles, manta rays, and other aquatic animals. Maratua has great tourism potential, however, this tourism potential was the lack of management therefore the local government teamed up with the Republic of Seychelles to help the tourism sector, especially the ecotourism on Maratua island. The research method used is descriptive and includes primary and secondary data types. The analysis technique used is qualitative. The research used the concept of paradiplomacy and ecotourism. The results of this study show that local governments have started to promote their potential tourism and have learned to develop ecotourism. The Republic of Seychelles also helps to promote tourism and offers to build the tourism sector through the development of ecotourism on the island of Maratua.*

Keywords: *Paradiplomacy, Local Government, Ecotourism, Maratua Island*

Pendahuluan

Pada tahun 1980, *trend* atau kecenderungan pasar wisatawan internasional ditandai dengan tumbuhnya kelompok pasar baru yaitu pasar wisata minat khusus, yang memiliki motivasi perjalanan khusus untuk terjun atau terlibat secara aktif dan intens dalam berbagai aktifitas petualangan alam, interaksi yang mendalam terhadap komunitas untuk mempelajari budaya dan berbagai keunikan lokal. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran (*learning*), pemberian penghargaan terhadap diri dalam melihat keindahan serta keunikan yang ada dalam suatu wisata (*rewarding*), upaya pengkayaan pengetahuan (*enriching*), dan petualangan (*adventuring*), serta untuk tujuan aktualisasi diri melalui keterlibatan dalam berbagai aktifitas yang unik dan menantang. Berkembangnya pariwisata minat khusus sejalan dengan telah berkembangnya pariwisata berbasis alam yang sangat peduli akan pelestarian alam atau lingkungan yang disebut dengan ekowisata (Fandeli dan Nurdin, 2005).

Ekowisata merupakan jenis pariwisata paradigma baru yang mendapatkan perhatian dari kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat maupun pengelola wisata. Ekowisata muncul karena isu lingkungan pada tahun 1972 dalam Konferensi Stockholm, yang berpengaruh terhadap perkembangan ekowisata suatu negara, kemudian ekowisata berkembang mengikuti perkembangan isu lingkungan. Ekowisata muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap wisata alam dan wisata terbuka yang mengandung banyak pengunjung yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : gitafitriade@gmail.com.

kerusakan pendapatan potensial. Ekowisata kemudian muncul dengan bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian dari masyarakat terhadap lingkungan dengan cara melakukan wisata secara positif yaitu berwisata dengan tetap menjaga dan memelihara lingkungan sekitar (Bushell, 2001).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut tertarik untuk meningkatkan sektor pariwisata. Indonesia memiliki karakteristik negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.499 pulau yang kaya akan keanekaragaman hayati dan menyimpan banyak potensi, baik itu potensi alam maupun potensi kepariwisataan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia didominasi potensi wisata bahari yang banyak ditemukan destinasi wisata bahari. Didominasi potensi wisata bahari, Indonesia juga mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan potensi wisata bahari daerah dengan konsep ekowisata. Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Contohnya Taman Nasional Bunaken, Bali, Raja Ampat, Pulau Nias, dan Kepulauan Derawan (Adrianto, 2015).

Salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan banyak potensi yang dapat dikembangkan ialah Provinsi Kalimantan Timur, dimana wilayah tersebut didominasi potensi wisata bahari. Namun dari beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi di Kalimantan Timur, salah satu tempat yang sering dikunjungi wisatawan ialah Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau, dikarenakan memiliki keindahan alam yang telah tercatat sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia Kabupaten Berau terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 34.127,47 km² terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km² dan luas laut 11.962,42 km², memiliki banyak potensi wisata, antara lain wisata alam, bahari, serta potensi maritim. Kabupaten Berau memiliki keanekaragaman hayati antara lain, terdapat 13 pulau dan 2 di antaranya Pulau Maratua dan Pulau Sambit yang merupakan pulau terluar di Indonesia (beraukab.go.id, 2014).

Berau yang berlokasi di region Sulu-Sulawesi, merupakan “jantung” Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*) yaitu kawasan ekosistem laut yang paling beragam dan paling produktif di dunia. Kawasan ini memiliki variasi tipe habitat laut tropis yang tinggi, beragam bentukan terumbu karang yang mengelilingi pulau-pulaunya (karang cincin, karang tepi, karang penghalang dan karang tompok), sampai hutan bakau yang lebat. Keanekaragaman ekosistem ini memberi kekayaan keanekaragaman hayati, dengan 872 spesies ikan, sedikitnya 233 spesies algae, 16 spesies rumput laut, 33 spesies bakau, 444 spesies karang, dan sedikitnya 22 spesies mamalia laut termasuk didalamnya dugong dan lumba-lumba. Kawasan ini juga menjadi kawasan bertelur penyu hijau terbesar di Asia Tenggara. (Necolsen, 2013).

Hal ini sejalan dengan Pulau Maratua yang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, yang memiliki banyak potensi alam dan keanekaragaman hayati lautnya. Namun, disamping banyaknya potensi wisata yang dimiliki Maratua, masih terdapat kendala dalam pembangunan maupun perkembangan promosi di Berau, serta masih dihadapkan pada kurangnya upaya dalam mempromosikan pariwisata yang ada (bisnisukm, 2009). Adapun akses yang sulit juga menjadi salah satu kendala dalam perkembangan pariwisata di Berau. Pemerintah Daerah juga tidak dapat berdiri sendiri untuk mengembangkan potensi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama yang melibatkan masyarakat dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan potensi wisata tersebut. Sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan hal dapat menjadi modal dalam mengoptimalkan serta mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Berau khususnya di Pulau Maratua (Aini, 2018).

Pengalaman Nico Barito, Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, yang telah berlibur di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban, telah melihat potensi wisata yang dinilai perlu dikembangkan khususnya di Pulau Maratua. Oleh karena itu, Nico Barito secara khusus datang dan menawarkan kerjasama melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, Pada 10 September 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Republik Seychelles menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang bertujuan untuk membangun sektor pariwisata berbasis *ecotourism* (wisata berbasis lingkungan) yaitu dengan tetap mempertahankan dan bertanggung jawab untuk menjaga keasrian alam dan lingkungan khususnya di Pulau Maratua. Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Utusan Khusus Republik Seychelles untuk ASEAN Nico Barito berdurasi selama 3 tahun dari tahun 2015 hingga 2018, yang mempunyai tujuan meningkatkan hubungan baik dan erat antara kedua negara untuk melaksanakan program dan aktivitas dalam rangka mendukung pengembangan ekowisata di Provinsi Kalimantan Timur (kaltimprov.go.id, 2015).

Kerangka Teori

Konsep Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan hubungan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak asing atau disebut dengan istilah '*sub-state*', dengan bertujuan mencapai suatu kepentingan secara spesifik dan fokus terhadap isu-isu tertentu. Paradiplomasi muncul dikarenakan negara bukan lagi menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Adanya pemanfaatan *power* yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Mekanisme pembagian *power* kepada entitas lokal atau pemerintah daerah dilakukan agar negara dapat mendapatkan keuntungan lebih maksimal. (Wolff, 2009).

Adapun terdapat 3 tipe paradiplomasi yang menurut Miguel Santos Neves, yaitu (Neves, 2010):

a. *Transborder diplomacy.*

Hubungan diplomasi oleh aktor sub-nasional yang secara letak daerah berbatasan langsung.

b. *Transegional Paradiplomacy.*

Hubungan diplomasi oleh negara berbeda negara namun masih dalam satu kawasan yang sama, akan tetapi tidak berbatasan secara langsung.

c. *Global Paradiplomacy.*

Hubungan diplomasi antara aktor sub-nasional namun berada di kawasan yang berbeda.

Praktek paradiplomasi merupakan bagian kelanjutan dari sejarah integrasi di masing-masing negara dan telah lama diterapkan oleh negara-negara maju. Di dalam praktek paradiplomasi, menurut Lecours terdapat 3 kelompok kategori, antara lain (Lecours, 2008):

a. Hubungan Kerjasama Pemerintah Regional (*sub-states*).

Hubungan Tujuan kerjasama hanya berfokus kepada ekonomi, seperti halnya pengembangan investasi ke luar negeri, perluasan pasar, maupun investasi yang

dilakukan secara timbal balik. Hubungan kerjasama ini tidak dipengaruhi oleh motif politik ataupun budaya. Contoh negara yang menerapkan interaksi jenis transnasional ini ialah Australia dan beberapa negara bagian Amerika.

b. *Paradiplomasi Berbagai Bidang dalam Kerja Sama (multipurposes).*

Hubungan kerja sama dalam berbagai bidang antara lain kerja sama ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, alih teknologi, dan lainnya. Contoh beberapa provinsi di Jerman telah mempraktekkan hubungan kerjasama tersebut, serta pemerintah regional Perancis melakukan hubungan kerjasama dengan beberapa negara bagian Afrika.

c. *Global Paradiplomasi Kompleks (Motif Politik dan Identitas Nasional Wilayah).*

Hubungan kerja sama dilakukan karena semangat untuk menunjukkan identitas nasional wilayah secara spesifik dan berbeda secara otonom dengan sebagian besar wilayah di negara tersebut. Contoh negara yang melakukan hubungan kerjasama tersebut ialah Flanders-Belgia, Catalonia-Spanyol, dan Quebec-Canada.

Konsep Ecotourism

Ekowisata menurut *The International Ecotourism Society* (TIES) merupakan perjalanan wisata alam dengan melakukan konservasi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab akan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Arida, 2017). *The International Ecotourism Society* (TIES) merupakan lembaga non-profit internasional pertama yang didedikasikan untuk ekowisata sebagai sebuah alat untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip ekowisata menurut TIES antara lain (ecotourism.org, 1990):

- a. Meminimalisasi dampak, antara lain dampak lingkungan dan dampak sosial
- b. Membangun kesadaran rasa hormat terhadap lingkungan dan budaya
- c. Memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjung dan masyarakat setempat
- d. Memberikan manfaat keuangan langsung untuk konservasi
- e. Memberikan manfaat finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat
- f. Meningkatkan sensitifitas politik, lingkungan, dan iklim sosial di negara tuan rumah

Pada Konferensi Rio tahun 1992, menghasilkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) dimana setiap negara diminta untuk menyusun strategi konservasi nasional dengan upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati sebagai komponen penting ekowisata. Setelah itu, beberapa badan dunia, peneliti, pecinta lingkungan, serta ahli-ahli di bidang pariwisata mulai menjalankan kegiatan ekowisata dengan cara masing-masing. Perkembangan ekowisata di dunia berkembang secara pesat, terutama di daerah Amerika Latin (yang dialiri oleh sungai Amazon), kegiatan ini yang pada

awalnya untuk mengunjungi wisata alam berujung menjadi penyelamatan lingkungan hidup (konservasi) (Nugroho, 2011).

Untuk menjadi kawasan pengembangan ekowisata pada awalnya harus melalui proses perencanaan, dimulai dari penilaian suatu kawasan yang telah diidentifikasi potensi kawasan ekowisata. Jika kawasan tersebut telah dikembangkan, namun terancam oleh kerusakan maka perlu ditinjau kembali penyebabnya sebelum dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Hal ini tidak terlepas dari 3 syarat untuk perencanaan kawasan ekowisata antara lain, untuk menghindari ancaman yang terjadi di kawasan konservasi, pendapatan yang dialokasikan oleh konservasi, serta manfaat yang didapat oleh masyarakat sekitar secara optimal. Pengembangan kawasan ekowisata juga harus mampu meningkatkan pengalaman bagi wisatawan yang mempunyai minat pada lingkungan (Asmin, 2017).

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan Republik Seychelles. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *document-based research* dan *internet-based research* dengan mencari sejumlah literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif dalam bentuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh kemudian mengaitkannya dengan teori yang digunakan lalu kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Program pengembangan ekowisata mulai dikembangkan dan diimplementasikan di Maratua. Oleh karena itu, Seychelles kemudian ikut tertarik dalam pengembangan ekowisata tersebut melalui Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito tertarik dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Berau untuk pengembangan ekowisata di Pulau Maratua. Pada 18 Desember 2013, Nico Barito melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk membicarakan mengenai kerjasama yang ingin dilakukan Seychelles dalam pengembangan ekowisata khususnya di Pulau Maratua. Hasil perundingan tersebut mencapai kesepakatan dengan adanya kunjungan tim teknis yang secara berkala dan rutin untuk mempersiapkan sosialisasi pada bulan Maret 2014

Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2014 diadakannya Seminar Nasional Maratua Menuju Destinasi Wisata. Setelah itu, pada tanggal 30 Januari 2015, Pemerintah Seychelles mengundang investor serta mempersiapkan PT. Pengembangan Pulau Nusantara (PPN) yang berfungsi sebagai integrator dengan memfasilitasi hubungan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan para pihak (*skateholder*) yang berminat untuk membangun dan mengembangkan pariwisata di Pulau Maratua. Kerjasama ini merupakan bentuk dari keseriusan Maratua dalam mengembangkan ekowisata dan mempromosikan wisata daerah untuk dijadikan destinasi unggulan.

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) kemudian dilakukan pada tanggal 10 September 2015, kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, dan Pemerintah Seychelles yang bertujuan untuk mengembangkan ekowisata di Pulau Maratua. Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun

yaitu dari 2015 hingga 2018. Terdapat poin-poin kerjasama yang dapat membantu untuk dijadikan pedoman dalam kerjasama, sehingga dapat dijadikan acuan melihat perkembangan dan hasil implementasi kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Seychelles.

a. Berbagi pengalaman terbaik dalam pengembangan ekowisata (wisata bahari) di Provinsi Kalimantan Timur

Kerjasama antara Pemerintah Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, dengan Pemerintah Seychelles mendapatkan keuntungan dengan adanya undangan dari pihak Seychelles untuk berkunjung ke Seychelles. Pada 17 Maret 2019, Pemerintah Kalimantan Timur diundang untuk melakukan kunjungan kerja ke Seychelles dengan mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana pengelolaan pariwisata di Seychelles. Kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan rangkaian dalam menindaklanjuti kerjasama sektor kepariwisataan yang telah sebelumnya telah ditandatangani dalam bidang pengembangan pariwisata yang berfokus terhadap konsep *ecotourism*. Selama berada di Seychelles, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memanfaatkan waktu untuk berbagi pengalaman dan mempelajari mengenai ekowisata di Seychelles dan mengunjungi *Tourism Academy* yang didampingi oleh Pimpinan *Tourism Academy*, Flavien Joubert. Tempat tersebut merupakan sebagai tempat pelatihan yang dinilai mampu menjadikan para pemuda menjadi tenaga kepariwisataan kelas dunia (kaltimprov.go.id, 2019).

b. Konsultasi perencanaan pembangunan pulau eko-laut, promosi, dan investasi

Seychelles mengirimkan Ed Baker sebagai konsultan perencanaan pembangunan kawasan Maratua sebagai realisasi kerja sama dengan Utusan khusus Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito. Keterlibatan Seychelles dalam kerjasama tersebut juga telah membuka peluang kerjasama dengan adanya perusahaan-perusahaan yang ikut saling membantu bersama pemerintah daerah untuk mengembangkan ekowisata di Pulau Maratua dengan tidak bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Selain mengutus konsultan perencanaan, Seychelles juga telah mempromosikan Maratua dengan mengajak perusahaan konsorsium untuk ikut berinvestasi dalam pengembangan ekowisata di Pulau Maratua. Telah dilakukan rencana kesepakatan dengan 14 perusahaan swasta lokal, hasil konsorsium yang direncanakan bernama PT. Pembangunan Pulau Nusantara (kaltim.prokal.co, 2018).

Pembangunan wisata Pulau Maratua, tertuang dalam satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) PT. Pembangunan Pulau Nusantara (PPN). Perusahaan konsorsium dengan lahan kepemilikan seluas 200 Ha di Maratua. Kepemilikan lahan tersebut telah direncanakan akan dibangun sejumlah *resort* dan rencana pembangunan *resort* golf yang menjadi bagian utama dari Kawasan Industri Pariwisata yang dicanangkan Gubernur Kalimantan Timur. Golf merupakan salah satu olahraga yang diminati banyak wisatawan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang dilakukan Ed Baker, direncanakan sekitar 18 *hole* untuk *resort* golf. Berbagai fasilitas juga disiapkan, mulai dari pusat belanja tradisional, pusat informasi wisata, pusat kesehatan serta *homestay* yang merupakan milik masyarakat setempat (berau.prokal.go, 2018). Seychelles juga turut memberikan dana bantuan dalam pengembangan ekowisata di Pulau Maratua yaitu sebesar Rp 50 Miliar. Jika ditotal antara dana hibah dan ditambah

dengan dana investor, jumlah dana awal dalam pengembangan Maratua adalah sekitar Rp 63 Miliar. Untuk dana yang telah diberikan Seychelles tersebut akan digunakan untuk pembuatan sanitasi, pelabuhan dan infrastruktur di Maratua (Puspa, 2019).

c. Pertukaran informasi mengenai pariwisata yang bertanggung jawab dan manajemen lingkungan dan pengembangan fasilitas untuk mendukung ekoturisme di Provinsi Kalimantan Timur

Pada tanggal 1 Desember 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bersama Pemerintah Kabupaten Berau melakukan kunjungan kerja ke Seychelles. Kunjungan tersebut dilakukan selama 4 hari yaitu dari tanggal 1 hingga 4 Desember 2019, hal ini merupakan tindak lanjut dari program kerjasama pengembangan objek wisata Pulau Maratua serta sekaligus undangan dari Seychelles. Sebelumnya pada tanggal 17 Maret 2019, telah dilakukan kunjungan yang sama. Dalam pertemuan tersebut, Danny Faure serta Nico Barito melanjutkan pembahasan mengenai kerjasama pengembangan pengelolaan pariwisata khususnya ekowisata di Pulau Maratua Hal tersebut dilakukan karena Seychelles dikenal sukses dalam mengaplikasikan *ecotourism*, yaitu dengan tidak menerima wisatawan dalam jumlah besar (*mass tourism*) (Putra, 2019). Adapun kebijakan *responsible diving* yaitu larangan untuk menginjak karang, tidak menyentuh hewan laut, tidak memperjualbelikan yang berkaitan dengan produk laut. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan di Seychelles (indian-ocean.com, 2014).

Kedua negara juga saling bertukar informasi mengenai pariwisata dan Seychelles juga membantu dalam mempromosikan serta menjadi partner dalam pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Berau. Pemerintah Kalimantan Timur belajar sekaligus melakukan kerjasama pada pengelolaan obyek wisata agar diharapkan dapat melakukan hal yang sama dalam menarik jumlah wisatawan Pemerintah Kabupaten Berau juga berharap nantinya Pulau Maratua juga diminati oleh wisatawan dari Eropa dan Amerika. Pulau Maratua juga akan mengadopsi konsep yang diterapkan oleh Seychelles, yaitu dengan membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung demi menjaga kelestarian alam setempat. Konsep ekowisata ini juga adanya peran masyarakat lokal dalam pengembangannya dan diharapkan dapat membawa manfaat yang positif bagi masyarakat di Pulau Maratua (Laya, 2020).

d. Pelatihan dan pengembangan kapasitas keramahtamahan dan layanan termasuk pertukaran program magang bagi pejabat pemerintah dan pemuda

Tindak lanjut kerjasama Pemprov Kaltim dengan Seychelles dilakukan dengan pembukaan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja Samarinda, siswa yang terpilih akan dikirim ke Seychelles dan di *training* agar dapat ditempatkan di Pulau Maratua dengan dibutuhkan tenaga kerja yang terampil terutama dalam bahasa inggris yang nantinya dapat menjadi *guide*, *ressepsionist* dan tim *leader*. Pemerintah juga mengirim duta wisata dan pelatihan kepariwisataan selama satu bulan, Duta budaya sebanyak enam orang selain menampilkan keragaman tarian dan seni budaya. Sedangkan tenaga kepariwisataan sebanyak lima orang akan mengikuti pelatihan. Duta wisata dan pelatihan kepariwisataan tersebut akan magang di empat hotel di kawasan *Seychelles Tourism Board*. Akomodasi, transportasi, serta biaya hidup disponsori PT.

Pembangunan Pulau Nusantara (PPN). Khusus tenaga magang dan pelatihan dibiayai sebesar 300 Euro atau sekitar Rp 4 Juta per orang (kaltimprov.go.id, 2019).

Berdasarkan kesepakatan kerjasama yang telah dilakukan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, dengan Pemerintah Seychelles melalui Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN. Jangka waktu yang telah ditetapkan selama 3 tahun, dimulai dari tahun 2015 hingga 2018, menyangkut hal tersebut dari beberapa poin kerjasama, terdapat beberapa yang telah direalisasikan dimana pada tanggal 20 September 2018, adanya dana hibah dari Seychelles, Pengiriman Konsultan Perencana, Pembuatan *Grand Design*, serta kunjungan ke Seychelles untuk berbagi pengalaman serta pertukaran informasi untuk pengembangan ekowisata di Pulau Maratua. Namun dalam proses kerjasama tersebut masih belum dijalankan secara maksimal, oleh karena itu setelah adanya pemberian dana hibah, dilakukannya kajian awal mengenai rencana pembangunan kepariwisataan Pulau Maratua. Untuk mensinergikan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau yang didalam rencana strategis pengembangan ekowisata di Pulau Maratua, maka dibentuknya Tim Percepatan Kerjasama Pengembangan Kepariwisata Pulau Maratua melalui kesepakatan bersama (kaltimprov.go.id, 2019).

Sebagaimana Keputusan bersama Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Berau, dan Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN tentang Pembentukan Tim Percepatan Kerjasama Pengembangan Strategis Kepariwisata Kepulauan Maratua di Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2019 dengan mengemukakan mengenai tugas dan wewenang tim percepatan, meliputi:

- a. Mensosialisasikan kepada para pihak (*stakeholders*) tentang makna dan pentingnya pengembangan kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat
- b. Memfasilitasi program demi terwujudnya Satu Maratua untuk semua (*One Maratua for All*)
- c. Mendorong percepaan terwujudnya pembangunan kepariwisataan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerjasama
- d. Melakukan koordinasi dengan para pihak maupun pemerintah guna mendukung terlaksananya pengembangan strategis kepariwisataan Pulau Maratua
- e. Mencari dan mengumpulkan informasi serta data yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan Pulau Maratua.

Dalam proses paradiplomasi, akan ditandai dengan adanya pertemuan dua belah pihak terkait antara pemerintah daerah dan pihak negara lain yang bersangkutan untuk kesepakatan kerjasama didukung adanya penandatanganan perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) diiringi dengan pembuatan *Master Plan* yang dapat dijadikan pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam menjalin kerjasama dengan pihak dari luar negeri. Dijabarkan didalam *Master Plan* yang berjudul *Maratua Island Vision 2025*, telah dijelaskan mengenai rencana pengembangan Pulau Maratua dengan menggunakan konsep *blue economy* yaitu dengan menjaga alam serta melindungi pelestarian alam dan lingkungan, pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta meningkatkan mata pencaharian dan peluang kerja. Hal tersebut merupakan bentuk perkembangan ekowisata di Maratua, yang pada awalnya pengembangan

ekowisata berbasis masyarakat, kemudian pengembangan ekowisata berupa konservasi keanekaragaman hayati laut dan berbasis masyarakat, dan setelah itu *upgrade* ke konsep pengembangan ekowisata *blue economy* (Harakan, 2018).

Namun, telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan dibuatnya *Master Plan* serta pembentukan tim percepatan kerjasama untuk rencana-rencana yang dicanangkan berdasarkan poin-poin kerjasama dalam pengembangan Pulau Maratua, masih terdapat beberapa hambatan dalam pengerjaannya. Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan kerjasama dan pengembangan ekowisata itu sendiri. Pada praktiknya sendiri, dalam paradiplomasi telah ditegaskan bahwa adanya pelimpahan kekuasaan atau wewenang pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan negara lain tanpa adanya hambatan dari pemerintah pusat.

Adanya pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan bentuk kerjasama luar negeri yang kemudian dilakukan dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan Republik Seychelles. Praktek paradiplomasi yang digunakan ialah termasuk dalam kategori kerjasama yang melibatkan berbagai bidang kompleks, yaitu salah satunya kerjasama ekonomi. Sebagai bentuk untuk mengembangkan sektor pariwisata di Pulau Maratua serta dapat pula mensejahterakan masyarakat sekitar dengan membantu perekonomian masyarakat daerah Pulau Maratua. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Seychelles ini juga ditandai dengan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU), bentuk kerjasama yang diharapkan dapat saling menguntungkan ataupun hanya bantuan untuk membangun perekonomian. Dapat digunakan sebagai komponen pendukung yang turut membantu untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah, baik itu melalui bantuan tenaga ahli, bantuan teknis, maupun bantuan lainnya (Mukti, 2013).

Dalam konsep paradiplomasi ini, Pemerintah Provinsi yang sebagai payung kerjasama juga ikut berperan aktif dalam memberikan seminar serta pengiriman duta budaya ke Seychelles untuk ikut serta dalam memfasilitasi potensi ekowisata yang ada di Pulau Maratua. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya pembagian kekuasaan, karena pemerintah daerah juga telah diberikan kekuasaan untuk melakukan hubungan kerjasama internasional dengan negara lain secara langsung tanpa harus melalui pemerintah pusat. Peran Seychelles yang membantu dalam memberikan pengalaman serta pembelajaran, dikarenakan Maratua dinilai memiliki kemiripan dengan Seychelles, sehingga diharapkan dapat mengikuti jejak Seychelles dalam pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan sesuai dengan konsep ekowisata yang sebelumnya telah diadaptasi oleh negara tersebut (Nye, 2011).

Namun, dalam proses pengembangan ekowisata di Pulau Maratua yang melibatkan pemerintah Kabupaten Berau dengan Utusan Khusus Presiden Seychelles mengalami hambatan dalam hal regulasi, yaitu aturan pemerintah pusat untuk pelaksanaan praktik paradiplomasi yang harus melalui pemerintah pusat sebagai aktor untuk menjadi payung kerjasama. Sebagaimana disebutkan bahwa adanya hambatan mengenai regulasi, ini membuktikan bahwa Indonesia masih belum siap dalam hal regulasi menyangkut pembuatan aturan dalam praktik paradiplomasi, yaitu pemberian wewenang untuk pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Aturan dan protokol kerjasama yang dibuat masih belum jelas untuk pemerintah daerah, sehingga dapat menyebabkan banyak kasus kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah dan negara lain yang kemudian telah ditandatangani, tidak berjalan sesuai dengan poin-poin kerjasama ataupun tidak berjalan sama sekali. Oleh karena itu,

regulasi kerjasama yang belum sesuai dengan aturan di Indonesia ini menjadi hambatan utama dalam proses kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan Seychelles, karena diperlukannya perubahan MoU dengan posisi yang setara dengan adanya peran Menteri Pariwisata Indonesia dan Menteri Pariwisata Seychelles sebagai payung kerjasama.

Hambatan tersebut juga berdampak terhadap permasalahan dana, dimana dana hibah atau pemberian dari Seychelles yang seharusnya dapat diterima langsung oleh Pemerintah Daerah, namun karena hambatan dalam regulasi aturan yang kemudian terjadinya perubahan kebijakan MoU dengan posisi setara antara Menteri Pariwisata Indonesia dan Menteri Pariwisata Seychelles tersebut, dana kemudian dialihkan ke perusahaan yaitu PT. Pembangunan Pulau Nusantara, yang dianggap sebagai jalan alternatif. Adanya peran perusahaan yang dominan di dalam proses pengembangan ekowisata Maratua ini, pada nyatanya tidak sesuai dengan praktik paradiplomasi dan ekowisata didalam proses pelaksanaannya. Pemerintah Daerah yang pada awalnya merupakan aktor dalam praktik paradiplomasi, kemudian digeser dengan adanya keterlibatan perusahaan, yaitu para pemegang kepentingan yang mempunyai kuasa dalam prosesnya karena masing-masing investor mempunyai kepentingan. Kemudian dalam praktik ekowisata, dimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dan memaksimalkan pembangunan didaerah untuk memajukan sektor pariwisata daerahnya serta dapat mensejahterakan rakyat, namun tidak sesuai dengan ekowisata itu sendiri dimana adanya peran perusahaan yang seringkali mengambil keuntungan tanpa memikirkan untuk keterlibatan masyarakat daerah dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Beberapa poin kerjasama dimana memberikan dampak positif dalam perkembangan pariwisata di Pulau Maratua, yakni keterlibatan masyarakat sebagai pemandu wisata, menyediakan *homestay*, dan keahlian membuat kerajinan. Seychelles juga membantu dana sebesar Rp 50 Miliar untuk pengembangan infrastruktur dan sanitasi, mengirimkan konsultan perencanaan, mengundang pemerintah daerah untuk berkunjung ke Seychelles, membentuk perusahaan konsorsium untuk menaungi para investor yang ikut serta dalam pembangunan ekowisata, dan menawarkan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai pemerintah maupun pemuda sebagai pelengkap fasilitas ekowisata di Pulau Maratua.

Namun, implementasi kerjasama dengan konsep paradiplomasi dan ekowisata tersebut hanya sebagai regulasi, selebihnya hanya kerjasama antara pihak pemerintah kabupaten berau dengan swasta. Sehingga, konsep paradiplomasi dan ekowisata tidak terwujud maupun terlihat dalam pembahasan dan implementasi kerjasama. Adanya permasalahan regulasi di pemerintah pusat serta dominasi pihak swasta yaitu keterlibatan perusahaan atau investor dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata di Maratua. Kemudian, hambatan dalam regulasi kerjasama yang belum sesuai dengan aturan Indonesia dengan posisi Menteri Pariwisata Seychelles dan Menteri Pariwisata Indonesia sebagai payung kerjasama. Kemudian permasalahan mengenai transparansi keuangan, dana bantuan dari Seychelles tidak dapat langsung ke Pemerintah Daerah melainkan masuk ke dalam PT. Pembangunan Kepulauan Nusantara. Hambatan tersebut akan berdampak pada proses pengerjaan dan pengelolaan ekowisata Maratua yang tidak dapat berjalan secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Ahmad Harakan, 2018. *Paradiplomasi dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Sosial di Kabupaten Bantaeng, Vol.3 No.1*, terdapat dalam <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/view/443> diakses pada 30 Maret 2020.
- Arida, I Nyoman Sukma. 2017. *“Ekowisata: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata”*. Cakra Press. Bali.
- Asmin, Ferdinal. 2017. *“Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: dimulai dari konsep sederhana”*. Institut Pertanian Bogor.
- Bupati Berau Luncurkan *“Stasiun Pengawasan Terapung Penyu Laut”*, terdapat dalam <http://assets.wwid.panda.org> diakses pada 1 Mei 2019.
- Bushell, Robin. 2001. *“The Place of Ecotourism, with Particular Reference to Australia”*. University of Western Sydney. Hawkesbury.
- Fandeli, Chafid dan Muhammad Nurdin. 2005. *“Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional”*. Cetakan 1. Penerbit Fakultas Kehutanan UGM. Pusat Studi Pariwisata UGM dan Kementerian Lingkungan Hidup. Yogyakarta.
- Gubernur Teken SKB Percepatan Pengembangan, terdapat dalam <https://kaltimprov.go.id/berita/gubernur-teken-skb-percepatan-pengembangan-maratua-dan-seychelles> diakses pada 18 Februari 2020.
- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, terdapat dalam <https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA>, diakses pada 14 April 2019.
- Kaltim Siap Kirim Duta Budaya ke Seychelles, terdapat dalam <https://kaltimprov.go.id/berita/kaltim-siap-kirim-duta-budaya-ke-seychelles> diakses pada 16 Februari 2020.
- Kembangkan Maratua Belasan Investor Patungan Ratusan Juta untuk Tanam Modal, terdapat dalam <https://diksi.co/news/kembangkan-maratua-belasan-investor-patungan-ratusan-juta-untuk-tanam-modal>, diakses pada 16 Februari 2020.
- Kerjasama Pengembangan Pariwisata, terdapat dalam <http://berau.prokal.co/read/news/38403-kerja-sama-pengembangan-pariwisata>, diakses pada 28 September 2018.
- Kondisi Geografis, terdapat dalam <http://beraukab.go.id/v2/profil/kondisi-geografis/>, diakses pada 2 April 2019.
- Potensi & Permasalahan Pariwisata di Kalimantan Timur, terdapat dalam <https://bisnisukm.com/potensi-permasalahan-pariwisata-kaltim.html>, diakses pada 20 Juni 2019.
- Lecours, Andre. 2008. *“Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World”*. Netherlands Institute of International Relations Clingendael. Netherland.
- Mukti, Takdir Ali. 2013. *“Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia”*. The Phinisi Press Yogyakarta.
- Neves, Miguel Santos. 2010. *“Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of “Soft Power” Vol.1*. Portugal: Universidade Autunoma de Lisboa.
- Nye, Joseph S. 2011. *“The Future of Power”*. Public Affairs. New York
- Nugroho, Iwan. 2011. *“Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan”*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

- Pemprov MoU dengan Dubes Republik Seychelles*, terdapat dalam <https://kaltimprov.go.id/berita/pemprov-mou-dengan-dubes-republik-seyshelle->, diakses pada 10 Juni 2019.
- Pengembangan Maratua Fokus Ekowisata*, terdapat dalam <https://kaltim.prokal.co/read/news/330843-pengembangan-maratua-fokus-ekowisata.html>, diakses pada 1 Maret 2020.
- Pulau Maratua Sebagai Objek Wisata Eksklusif*, terdapat dalam <https://www.indonesiana.id/read/137456/pulau-maratua-sebagai-objek-wisata-alam-eksklusif>, diakses pada 16 Februari 2020.
- Seychelles Islands Ecotourism Success Story*, terdapat dalam <https://www.indian-ocean.com/seychelles-islands-ecotourism-a-success-story/>, diakses pada 20 Maret 2020.
- The International Ecotourism Society: What is Ecotourism?*, terdapat dalam <https://ecotourism.org/our-story/>, diakses pada 2 April 2019.
- Tindaklanjuti Kerjasama Sektor Kepariwisata antar-negara Pemprov Kaltim Diundang ke Seychelles*, terdapat dalam <https://kaltimprov.go.id/berita/tindaklanjuti-kerjasama-sektor-kepariwisataan-antar-negara-pemprov-kaltim-diundang-ke-seychelles>, diakses pada 10 Februari 2020.
- Wabup Kunjungan ke Seychelles*, terdapat dalam <https://diswaykaltim.com/2019/12/04/wabup-kunjungan-ke-seychelles/>, diakses pada 16 Februari 2020.
- Wisata Maratua Libatkan Konsultan Perencana*, terdapat dalam <https://berau.prokal.co/read/news/55284-wisata-maratua-libatkan-konsultan-perencana>, diakses pada 15 Februari 2020.
- Wolff, Stefan. 2009. *“Paradiplomacy: Scope, Opportunities, and Challenges”*. University of Nottingham.